

B A B I I I

D E M O K R A S I T E R P I M P I N

A. Latar Belakang Demokrasi Terpimpin.

1. Pengertian Demokrasi Terpimpin.

sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam penegasan judul diatas, bahwa arti dari pada Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistim demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk-petunjuk yang tertentu. "yang ketetapannya diatur dalam ketetapan MPRS No. VII/MPRA/1965".¹

Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk menentang-sifat-sifat Libral dari pada Demokrasi Barat, yang bertentangan dengan asas-asas permusyawaratan untuk mencapai mufakat, sesuai dengan Pancasila. Dalam pelaksanaannya Demokrasi Terpimpin terlalu menonjolkan unsur pemimpin yang diberi hak untuk mengambil keputusan apabila tidak dicapai mufakat dalam suatu permusyawaratan. Maka dari itu ahirnya meluncur ke arah kediktatoran.²

Pada tanggal 22 April 1959 Presiden memberikan penjelasan mengenai definisi Demokrasi Terpimpin diantaranya:

¹ Insiklopedi Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973, hal. 301.

² Ibid.

ranya :

a. Demokrasi Terpimpin suatu sistim demokrasi yang dijalankan dengan rancangan dan petunjuk tertentu yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, atau tanpa otokrasinya - diktator yang berprinsip bahwa :

1. Tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada bangsa dan negara.
2. Tiap orang berhak mendapat mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.³

b. Demokrasi Terpimpin adalah penjabaran dari sila keempat dari Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara sesama kekuatan nasional progresif revolusioner yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yaitu tata cara dalam mengatur dan memimpin segala segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya masyarakat adil dan makmur serta menuju kelancaran jalannya revolusi.⁴

³A. Syafi'i Ma'arif, Islam Dan Masala Kenegaraan, Lp3ES, hal. 183.

⁴Muhono, Himpunan Ketetapan MPRS Dan Peraturan Negara Yang Penting Bagi Angkatan Bersenjata, Dimimpun Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 1966, hal. 1459.

c. Demokrasi Terpimpin adalah satu-satunya alat untuk mengemban amanat penderitaan rakyat dan tujuan Revolusi Nasional Indonesia, berdasarkan Pancasila, masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.⁵ Sebab Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi dengan adanya pimpinan, bukan pimpinan untuk menghilangkan demokrasi, akan tetapi untuk melawan sifat-sifat leblarnya dari pada demokrasi.⁶

Demokrasi Terpimpin sebagai landasan untuk menjalankan amanat penderitaan rakyat, maka sudah barang tentu kalau ia mempunyai azas, tujuan, fungsi, dan ciri-ciri tersendiri yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

Azas :

1. Demokrasi Terpimpin mempunyai dua unsur, yaitu Demokrasi yang kedua-duanya bergendengan mutlak - satu sama lainnya yang tidak bisa dipisahkan.
2. Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh Pancasila, baik ideologi maupun cara kerja.
3. Demokrasi Terpimpin menjamin kebebasan berfikir - dan berbicara mengemukakan pendapat dalam setiap permusyawaratan, dalam batas-batas keselamatan - negara, kepentingan rakyat banyak, dan bertanggung jawab kepada Tuhan.

Tujuan :

1. Demokrasi Terpimpin bertujuan melaksanakan haluan negara Manipol/Usdek untuk mencapai masyarakat - yang adil dan makmur, masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila, yang penuh kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklam kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.
2. Demokrasi Terpimpin bertujuan pula untuk melindungi - ngi dan menambahkan hak-hak bagi rakyat, dan meng-

⁵Ibid, hal. 1459.

⁶Soepardo SH Dkk, Civics, Manusia Dan Masyarakat - Baru Indonesia, Balai Pustaka, 1962, hal. 84.

hapuskan hak-hak kaum Imprialis, kaum Feodalis - serta kaki tangan kaum kontra revolosioner, kaum kontra revolosioner, kaum anti progresif dan kaum penghisap rakyat.

Fungsi :

1. Demokrasi Terpimpin adalah alat rakyat untuk men - capai tujuan rakyat yang telah dikorbankan oleh rak - yat berpuluh-puluh tahun, yaitu negara kuat, ma - syarakat adil dan makmur.
2. Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya adalah Demokra - si penyelenggara atau Demokrasi Kerja.
3. Demokrasi Terpimpin merupakan alat untuk melaksa - nakan konsepsi-konsepsi Bung Karno sebagai penyam - bung lidah rakyat, termasuk konsepsi-konsepsi yang dicetuskan pada tanggal 21 perbuari 1957.

Ciri has :

1. Demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan De - mokrasi Lebral, dan bukan diktator, tetapi adalah Demokrasi gotong royong dari semua golongan yang mendukung Revolusi Indonesia, menentang kapitalis - me, Imprialisme, Feodalisme, Kolonialisme.
2. Demokrasi Terpimpin bukan medan pertentangan anta - ra oponen satu sama lain, tetapi medan untuk men - cari kemenangan satu golongan atas golongan yang lain, dan untuk merebut kekuasaan oleh satu golo - ngan terhadap yang lain.
3. Demokrasi Terpimpin mencari sintesa, mencari aku - mulasi pikiran tenaga untuk melaksanakan Amanat - Penderitaan Rakyat.
4. Demokrasi Terpimpin melarang propaganda anti Nasi - onalisme, anti Agama dan anti Komunisme, tetapi sebaliknya menghendaki konsultasi sesama aliran - progresif revolosioner.

Sesuai makna yang terkandung diatas maka sudah seharusnya kalau Demokrasi Terpimpin itu mengakui adanya pimpinan, mengakui kebebasan berfikir, berbicara selama dalam batas kemaslahatan negara dan demi tercapainya ma - syarakat adil dan makmur dibawah payng Demokrasi Terpin - pin akan menjadi Demokrasi pelaksana Demokrasi kerja

⁷Muhono, Op, Cit., hal. 1460.

yang dengan sendirinya pola kerjanya harus disesuaikan dengan dengan kehendak rakyat.⁸

Namun setelah Bung Karno dapat merealisasikan konsepsinya itu ia berbalik dari konsepsinya sendiri, yakni dengan sistim Demokrasi Terpimpin tidak menambah terciptanya iklim persaudaraan umat yang sehat, politik yng bebas tanpa paksaan, tapi justru pikiran yang terkunci oleh budaya keotoriteran sehingga demokrasi yang tidak sehat ini menyeret negara dan umat kejurang kehancuran politik.

2. Latar Belakang Timbulnya Demokrasi Terpimpin.

Sejak UUDS RI, pemerintah menggunakan sistim parlementer, Kabinet RI silih berganti karna banyaknya perbedaan kepentingan dari parta-partai politik, sedang sistim kepartaian belum mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Untuk mengatasi hal ini diadakan lah pemilihan umum yang pertama.⁹

Pada ahir tahun 1955 di Indonesia diadakan pemilihan umum yang pertama untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante, dengan harapan akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara

⁸Soepardo SH, Dkk, Op, Cit., hal. 88.

⁹Musanef, Sistim Pemerintahan Di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, Cet, Pertama, 1983, hal. 44.

pada waktu itu, diharapkan konstituante akan dapat menghasilkan sebuah Undang-Undang Dasar yang dapat melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat.

Pada acara sidang pelantikan Konstituante tanggal 10 Nofember 1956 Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya sebagai berikut :

"Juga revolusi kita dengan darah, dengan air mata, dengan pengurbanan, dengan penderitaan, dengan tewasnya beribu-ribu jiwa. Untuk apa semua itu?

Untuk suatu Idee! Idee kemerdekaan dan keselamatan seluruh bangsa. Idee Negara Nasional Indonesia, Republik Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan keadilan sosial didalamnya.....

Segala pengurbanan yang telah diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita didalam revolosi, adalah untuk membela Idee Negara Nasional yang kita namai Republik Kesatuan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka mati untuk Idee Negara itu, untuk Idee Negara Nasional, Republik Proklamasi 17 Agustus-1945, dan Bukan untuk Idee Negara lain dari pada itu!

Maka kepada saudara-saudara anggota Konstituante - saya berseru : jika benar-benar kita menghormati pahlawan-pahlawan yang telah berkorban, jika kita benar-benar kita setia pada proklamasi 17 Agustus 1945, maka bikinlah konstitusi untuk Negara itu, dan bukan konstitusi untuk Negara yang lain atau Negara yang baru!

Selanjutnya Presiden Soekarno menyampaikan beberapa pesan kepada para peserta sidang Konstituante agar menunaikan tugasnya dengan menggunakan Undang - Undang

¹⁰CTS. Kansil, Julianto, Sejarah Perjuangan Indonesia, Erlangga, Jakarta, Cet, Kedelapan, 1986, hal.62-63.

Dasar Republik Indonesia.

1. Saya minta supaya saudara-saudara sebagai anggota - Konstituante menjadilah penyambung lidah yang setia dari pada 80-85 juta Rakyat Indonesia yang sedang berevolusi dan pahlawan-pahlawan Rakyat Indonesia - yang telah berkorban dan mati yang tiap-tiap tahun pada tanggal 10 November kita peringati.
2. Saya minta supaya Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sesuai dengan jiwa, watak dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
3. Saya minta janganlah Konstituante dijadikan tempat berdebat bertele-tele, suatu medan pertempuran bagi partai-partai atau pemimpin-pemimpin politik.....

Akan tetapi harapan tersebut dalam prakteknya sia-sia belaka karna sampai dua tahun lebih peserta sidang tidak membawa keputusan apa-apa, masing-masing pihak saling mempertahankan pendapatnya, walaupun sebagian besar menyetujui Pancasila sebagai Dasar Negara. Namun karna jumlah itu tidak dapat memenuhi syarat dalam suara yang berlaku bagi Konstituante, maka ahirnya sidang itu mengalami kegagalan.

Sejalan dengan itu perkembangan politik menjadi labil dan genting, dimana pertentangan partai-partai politik semakin menjadi-jadisehingga kedudukan Kabinet menjadi goncang terpengaruh oleh partai-partai pemerentah dan partai-partai oposisi. Hal itu mengakibatkan stabilitas negara tidak aman. Dengan kondisi yang demikian itu maka pada tanggal 2 Ferbuari 1957 Presiden mulai mengemukakan konsepsinya yang bertujuan untuk - menyelamatkan Republik Indonesia. Dan diantara pokok konsepsi itu:

- a. Gagasan pembentukan Kabinet Gotng Royong.
- b. Gagasan pembentukan Dewan Nasional.¹²

Setelah gagasan tersebut sudah semakin jelas arahnya maka ia memanggil para pemimpin partai politik ke Istana - Bogor pada tanggal 16 Ferbuari dan mengatakan perlu

11
Ibid, hal. 64.

12
Ibid. hal. 65.

terbentuknya Kabinet Gotong Royong yang anggotanya terdiri dari semua golongan yang jumlahnya lebih dari 6 juta suara. Disamping itu Dewan Nasional harus segera dibentuk yang terdiri dari wakil-wakil buruh, petani, intelektual, pengusaha nasional, pendeta Protestan Katolik dan Ulama' Islam, wanita dan angkatan 45, wakil-wakil pemuda, daerah ketiga kepala setiap angkatan bersenjata, kepala polisi, jaksa agung, dan beberapa menteri yang penting semua itu-saya sendiri yang akan memimpinnya kata Presiden.¹³

Dengan dalih untuk mengatasi keadaan itulah Presiden Soekarno melontarkan gagasannya di tahun 1957 yang pada pokoknya antara lain :

1. Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, oleh karna itu sistem ini harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin.
2. Untuk pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu Kabinet Gotng Royong yang anggotanya terdiri semua partai dan organisasi berdasarkan pertimbangan yang ada dalam masyarakat. Dan selanjutnya Kabinet harus berkaki empat yang mengadung arti bahwa empat partai besar yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI turut didalamnya untuk menciptakan kegotong royongan Nasional

¹³ Deliar Noer, Partai Politik Di Pentas Nasional, - PT Utama Grafiti, Cet, Pertama, 1987, hal. 353.

3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat, dan sebagai tugas Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada Kabinet baik diminta maupun tidak diminta.¹⁴

Selanjutnya konsepsi Presiden Soekarno semakin mengarah pada sistim Demokrasi Terpimpin, dalam hal ini ia memberikan dalih bahwa Demokrasi Terpimpin adalah mengarah pada satu tujuan revolusi, berdisiplin, berkeadilan sosial, sesuai dengan dasar hidup bangsa Indonesia yaitu gotong royong demi persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dengan sistim Demokrasi Terpimpin.¹⁵

Karna keadaan makin genting dan Konstituante lambat dalam menyelesaikan tugasnya maka pada tanggal 2 April 1959 Presiden memberi amanat di depan sidang pleno istimewa konstituante, yang berjudul Respublika sekali lagi Respublika yang pada pokoknya kepala negara menganjurkan Konstituante menerima ajakan pemerintah kembali kepada UUD 1945 dengan pokok pikiran :

a. UUD 45 adalah merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan yang dapat dipakai untuk landasan guna menyelesaikan revolusi pada tingkatan sekarang.

¹⁴AMW.Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Yayasan Proklamasi, Jakarta, t,t., hal. 97.

¹⁵CTS. Kansil, Op. Cit., hal. 65.

- c. UUD 1945 adalah cukup demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia : "Kerakyantan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".
- b. UUD 1945 adalah lebih menjamin terlaksananya Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.
- d. UUD 1945 menjamin adanya pemerentahan yang stabil selama lima tahun, oleh karna kekuasaan DPR dibatasi tidak dapat menjatuhkan pemerintah/Presiden dan oleh karna kekuasaan tertinggi Kedaulatan rakyat berada ditangan MPR.

Karna Konstituante sudah dianggap tidak mungkin lagi dapat menyelesaikan tugasnya maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit untuk kembali pada UUD 1945.

Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore Presiden panglima tertinggi angkatan perang mengeluarkan Dekrit yang mengatakan bahwa terhitung mulai dari hari tanggal penetapan Dekrit UUD Proklamasi dan revolusi kita berlaku lagi bagi segenap bangsa dan tumpa darah Indonesia, dan bahwa UUDS RI tahun 1950 tidak berlaku lagi.

Dekrit itu dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan di umumkan secara resmi oleh Presiden pada hari Ahad pukul 17.00 di depan Istana merdeka Jakarta.¹⁶ Teks

¹⁶ Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, Rajawali, 1986, hal. 124.

Dekret tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ;

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan Pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

..Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 5 Juli 1959.

Atas nama rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima
Tertinggi Angkatan Perang

S. O E K A R N O.¹⁷

Dekret itu ditetapkan oleh Presiden atas nama rakyat Indonesia dan merupakan keputusan Presiden NO 150 Tahun 1959 yang diundangkan dalam Lembaran Negara NO 7 Tahun 1959.¹⁸

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden itu pula Konstituante dibubarkan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi adanya sidang pembuat Undang-Undang Dasar.

¹⁷Ibid, Hal. 126.

¹⁸CTS. Kansil, Op. Cit., hal. 67.

Dengan adanya Dekrit itu kedudukan Pancasila semakin kokoh, sebagai dasar negara maka semakin kokoh pula kedudukan Presiden Soekarno dalam memutar roda politik Demokrasi Terpimpin.

Dengan dibubarkannya Majelis Konstituante dan dihapusnya UUDS 1950 diganti UUD 1945 melalui Dekrit 5 Juli 1959 itu maka beralihlah sistim Demokrasi Parlementer dan mulailah Era Demokrasi Terpimpin ciptaan Presiden Soekarno itu.¹⁹

3. Faktor Beridirinya.

Apabila kita telah membaca lembaran Sejarah - pada sekitar tahun limapuluhan, maka kita akan tahu betapa kompleknya kondisi negara pada saat itu, dimana negara mengalami kekacauan-kekacauan ideologi sehingga sistim Undang-Undang sebagai penegak dan pengatur jalannya roda pemerintahanpun menjadi silih berganti.

Sejalan dengan itu pula iklaim persaudaraan - ummat juga untuk dipersatukan, masing-masing golongan politik hanya sibuk dengan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan yang lain.

Kenyataan inilah yang mendorong Presiden Soeka-

¹⁹M. Syafi'i Ma'arif, Islam Dan Politik Di Indone- Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, Cet. Pertama, 1988, hal. 42.

no merubah-ubah pemerintahan yang telah berlaku sejak Indonesia merdeka, ingin mengganti dengan sistim pemerintahan yang baru yang sesuai dengan jiwa rakyat Indonesia, dan tuntutan revolusi. Demokrasi liberal yang dipoyungi oleh UUDS 1950 sudah tidak cocok dengan situasi yang ada bahkan malah jauh dari tujuan masyarakat adil dan makmur, mengapa demikian? sebab masing-masing golongan politik saling berebut keuntungan dengan menubarkan yang lain Soekarno ingin melihat satu untuk semua, semua buntut satu yang berarti bangsa Indonesia harus ber-satu dalam negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke.²⁰

Menurut Penganatan Presiden Soekarno bahwa pada masa Demokrasi Liberal rakyat ditanggungai pimpinan, rakyat menjadi alat Demokrasi. Dengan kata lain Demokrasi Liberal dan UUDS 1950 merupakan penyimpangan dari cita-cita revolusi Indonesia. Oleh karena itu revolusi harus kembali pada jalan aslinya.²¹ Dan selanjutnya Demokrasi Liberal harus segera dibongkar dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

Dari sisi lain bila dicari faktor atau penyebab berdirinya, mengapa harus Demokrasi Terpimpin? dapat pula

²⁰ Syafi'i Ma'arif, Islam Dan Masalah Kenecearaan, Op. Cit., hal. 182.

²¹ Ibid., hal. 83.

dicari pada kenyataan bahwa memang Bung Karno sudah tidak mau lagi hanya jadi tukang setempel, dalam arti seorang Presiden simbol sebagaimana yang ditentukan oleh UUDS - 1950, yang menjadi dasar Konstitusional bagi pelaksanaan Demokrasi Parleментар di Indonesia.²² Presiden Soekarno ingin langsung memimpin jalannya pemerintahan. Ia sudah muak melihat pertentangan-pertentangan golongan politik selama ini. Dia mengatakan bahwa Demokrasi Leberal yang ala Barat itu, padahal Indonesia ini sebuah negara di Dunia Timur, husudnya di Indonesia adalah Demokrasi yang has dipimpin oleh pimpinan.²³

Karna Soekarno melihat Majelis Konstituante selama dua tahun tidak ada keputusan, perdebatan masing-masing golongan tiada kunjung selesai, maka segera Presiden Soekarno mengambil alih dengan mengeluarkan Dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 dengan berbagai macam pertimbangan antara lain:

1. Sebagian besar anggota Konstituante menolak menghindari rapat-rapatnya lebih lanjut sehingga Konstituante tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya.
2. Konstituante tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan yaitu dua pertiga mengenai usul kembali ke

²²Syafi'i Ma'arif, Islam Dan Politik Di Indonesia-Pada masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965), Op, Cit., hal.51

²³Ibid, hal.55.

Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bahwa oleh karna itu telah timbul situasi yang berbahaya bagi Konstituante dan kesejahteraan negara (sehingga Presiden ikut campur tangan dalam keadaan darurat).
4. Dengan dukungan sebagian besar rakyat serta dikokohkan oleh keyakinan sekarang Presiden harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara.
5. Presiden yakin bahwa piagam Jakarta tanggal 22 Juli 1945 merupakan kesatuan dengan UUD 1945.²⁴

Maka pada tanggal 17 Agustus Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita dengan prinsip-prinsip dasar Demokrasi Terpimpin dengan dua kata gori ; pertama ; tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara. Kedua, tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dengan masyarakat bangsa dan negara.²⁵

Ahirnya Dekrit Presiden itu dinyatakan sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia yang menguraikan tentang lima kebijaksanaan, yaitu kembali kepada UUD 1945 Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Penjabaran dari Mani

²⁴

B.J. Bolan, Pergumulan Islam Di Indonesia, Gema - fity Pers, Cet, Pertama, 1985, hal. 104.

²⁵

Syafi'i Ma'arif, Op. Cit., Hal. 56.

festu Politik kemudian dikenal sebagai Manipol USDEK.²⁶

Dengan dinyatakan Dekrit 5 Juli 1959 maka terbuka jalan bagi Presiden Soekarno untuk merealisasikan konsepnya yakni berdirinya Demokrasi Terpimpin.²⁷

B. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Keinginan Soekarno untuk menciptakan Demokrasi Terpimpin sudah tampak sejak bulan Oktober 1956, pada tahun itu Presiden Soekarno sudah mulai membalak-balik konsepnya tentang Demokrasi Terpimpin.²⁸ Keinginan untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin itu tampak pula sejak adanya keputusan Kabinet Juanda dalam rangka kembalinya kembali kepada UUD 1945 tanggal 19 Februari 1959.

Pada tanggal 2 Maret 1959 perdana menteri Juanda mengucapkan keterangan pemerintah didalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai keputusan tersebut - bahwa pemerintah yakin pertumbuhan politik sejak tahun 1949 menunjukkan kelemahan-kelemahan antara lain terlalu banyak partai-partai dan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tidak ada Stabilitas pemerintahan, dan penyelewengan dibidang sosial ekonomi sering terjadi sehingga pemerintah yakin pula, kita harus

²⁶ AMW. Pranarka, Op, Cit., hal. 174.

²⁷ Ibid, hal. 173.

²⁸ B. J. Bolan, Op, Cit., hal. 27.

kita harus meninggalkan sistim pemerentahan yang lam dan- berganti sistim yang baru.²⁹

Atas dasar dan kiyakinan yang demikian itulah maka Dewan Menteri sampai pada kesimpulan dan menyetujui prin- sip Demokrasi Terpimpin, karna alam Demokrasi Lebral di pandang sudah tidak cocok dengan tuntutan Zaman.³⁰ Demokra- si Lebral harus dibongkar dan diganti dengan Demokrasi - Terpimpin. Demokrasi Terpimpin harus dipancangkan teguh- teguh diatas Demokrasi Lebral.³¹ Demi untuk mencapai ma- syarakat adil dan makmur yang sesuai dengan cita-cita - proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.³²

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bung Karno mengumumkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berla- kunya kembali UUDS 1950. Dan dia menandakan kepada selu- ruh rakyat bahwa masa ini adalah masa peralihan dari sis- tim lama kepada sistim yang baru, dari Demokrasi Parle - menter ke Demokrasi Terpimpin.

Secara resmi Demokrasi Terpimpin bermula dengan - dikeluarkannya Dekrit itu. Kemudian Konstituante yang dibentuk tahun 1956 dinyatakan bubar karna ketidak mampu- annya untuk merampungkan tugasnya, terutama dalam meneta-

²⁹ Ismail Suny, Pergeseran Eksekutif Penyelidikan - Hukum Tata Negara, Aksara Baru, Jakarta, hal.192.

³⁰ Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi Dewan Pertimbang- an Agung, 1961, hal. 488.

³¹ Soepardo, Hoetaoreek, Op, Cit., hal. 84.

³² Ismail Suny, Op, Cit., hal. 194-195.

tapkan dasar Pancasila atau dasar Islam.

Dengan dikeluarkannya Dekrit itu semua pimpinan pemerintahan dan angkatan bersenjata diserahkan kepada Presiden Soekarno. Bahkan demi kesatuan komando sesuai dengan prinsip Demokrasi Terpimpin. Begitu juga pimpinan rakyat serta organisasi massa secara formal langsung diserahkan kepada Presiden Soekarno dan Presiden secara langsung menjadi pimpinan semua itu. Dengan demikian kekuasaan semakin berpusat di Istana Negara. Fungsi departemen semakin berkurang khususnya Departemen Hankam (Pertahanan dan Keamanan). Otonomi Presiden semakin besar bahkan menjadi ukuran politik pada masa itu, sedang kekuatan politik lainnya menjadi lumpuh tidak berdaya, suhu politik menjadi kropos termakan budaya otoriter Demokrasi Terpimpinnya Presiden Soekarno.³³

Tindakan-tindakan Konstitusional lainnya lainnya semakin meluas, antara lain MPR hasil pemilihan Umum tahun 1955 pilihan rakyat dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk MPRS yang diatur oleh Penetapan Presiden (Penpres) No : 12 tahun 1959, tertanggal 22 Juli 1959, yang anggotanya dan diberhentikan oleh Presiden sendiri. Sejalan dengan itu dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung

³³Chairul Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama', Jatayu, Sala, Cet, Pertama, 1985, hal.221.

Sementara (DPAS) yang dianggap juga anggotanya diangkat dan diperhentikan oleh Presiden yang diatur melalui Penpres No. 3 tahun 1959.³⁴

Ahirnya pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, oleh DPAS ditetapkan sebagai garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) dan untuk memberangu sistim banyak partai maka, dikeluarkan Penpres No. 7 tahun 1959, tentang penyederhanaan Keptartaian, antara lain Masyumi dan PSI terkena Penpres ini. Kemudian DPR hasil pemilihan rakyat dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR yang diatur melalui Penpres No. 4 tahun 1960. Selanjutnya diselenggarakannya Konggres Pemuda Indonesia di Bandung pada Ferbuari 1960 yang kemudian isinya terkenal dengan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia).³⁵ Kemudian oleh DPAS dijadikan Manipol USDEK.

Manipol USDEK ini disusun oleh Presiden Soekarno sebagai pedoman pelaksanaan program kerja sesuai dengan perubahan-perubahan fondamental yang telah terjadi didalam sendi-sendi ketata negaraan di Indonesia, dari azaz dan faham Liberalisme menjadi Demokrasi Terpimpin

³⁴
Ibid, hal. 221.

³⁵
Ibid. hal. 221.

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959.³⁶ Dengan demikian berarti Presiden Soekarno telah berhasil merebut kunci kehidupan politik, sehingga mudahnya dia membelok-belokkan gagasannya dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui ungkapan-ungkapan yang seloganitas revolusioner yang berporoskan NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Kemudian Nasakom ini diwujudkan dalam seluruh jaringan lembaga - lembaga lainnya.³⁷

Tujuan adanya NASAKOM tersebut adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sebetulnya keinginan Soekarno - untuk mempersatukan bangsa Indonesia baik dikalangan Nasakom Nasionalis, Agama maupun Komunis/Marxis ini sudah dimulai sejak zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia.³⁸ - Yakni persatuan Islamisme, Nasionalisme, Marxisme, itu telah dicetuskan sejak tahun 1926.³⁹ Namun keinginan itu baru terealisasi setelah ia dapat memegang seluruh jaringan kekuasaan dengan sistim Demokrasi Terpimpin.

Konsep Nasakom ini memang asli dari pemikirannya sendiri, bahwa ide mempersatukan bangsa Indonesia dalam bentuk Nasakom itu tidak terlepas dari kepribadiannya

³⁶ Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi Dengan Lembaga RE-SO-PIM. Tahun Genta Kemenangan Genta Revolusi Indonesia, - Percetakan Negara, Cet Pertama, 1963, hal. 265.

³⁷ Chairul Anam, Op, Cit., hal. 222.

³⁸ Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Indonesia, Di-bawah Bendera Revolusi, Jakarta, Cet IV, 1965, hal. 3.

³⁹ A.Z. Abidin. Baharuddin, Bahaya Komunis, Bulan Bintang, Jakarta, Cet III, 1982, hal.80.

sendiri sebagaimana ia pernah mengatakan :

"Saya ini orang campuran, ya teis, ya Nasionalis - ya percaya kepada Tuhan, ya cinta kepada tanah air ya cita kepada Nasionalisme.....oleh sebab itu saya yakin Nasakom merupakan proses persatuan Indonesia.⁴⁰

Begitulah tekad bulat Soekarno demi terealisirnya-konsepsi Nasakom. Dan pada waktu itu tidak ada satupun partai politik yang berani menghalangi kehendaknya, hususnya NU, sebab resikunya terlalu besar karna pasti akan ditindak oleh Presiden Soekarno. Kondisi yang demikian inilah yang menurut pengamatan Alfian yang membuat partai-partai politik menjadi lumpuh kecuali PKI dan ABRI, di samping Presiden Soekarno sendiri sebagai pemegang kunci kekuasaan dan keseimbangan diantara kedua kekuatan.

Perwira-perwira militer, hususnya angkatan darat, yang memang pimpinan ABRI terkenal anti PKI komunis. Sikap anti Komunis dari militer ini terlihat dalam menghalangi-halangi PKI masuk dalam kabinet.

Tindakan ABRI menolak PKI masuk dalam Kabinet itu sangat memukul perasaan Presiden Soekarno yang sejak lama sekali menginginkan persatuan Nasional dengan selogan - NASAKOM. Sikap berlawanan ide Bung Karno itu mengakibatkan renggangnya hubungan antara militer dengan Presiden Soekarno. Dan ketidak senangan ABRI dengan PKI ini diang-

⁴⁰Chairul Anam, Op, Cit., hal. 222.

gap sebagai komunisto poby dari sikap pemimpin militer.⁴¹

Kerenggangan ABRI dengan Presiden Soekarno itu di -
manfaatkan oleh PKI sehingga tingkah laku politik banyak
diberikan kepada PKI.

Apa lagi kalau ide-ide PKI yang dilontarkan senanti
asa sejalan dengan ide Presiden Soekarno, sebagaimana ide
menesakomkan pimpinan militer, tentu saja itu merupakan
kesempatan emas bagi PKI dalam rangka merangkul Bung Karno,
dengan demikian maka PKI semakin keras dalam berusaha me-
masukkan pengaruhnya ke tubuh ABRI dan usaha ini berhasil
menyusup ke tubuh AU dan KKO dimasa itu. Akibat selanjut -
nya militer menjadi semakin lemah sehingga dalam suasana -
itu Presiden Soekarno dan juga PKI akan lebih mudah untuk
memasukkan pengaruhnya ke dalam.⁴²

Namun demikian Presiden Soekarno tetap membutuhkan-
militer untuk menyokong konsep politik Demokrasi Terpimpin
sebab ia tidak mempunyai basis massa sedangkan kebutuhan -
Presiden akan PKI adalah untuk mengimbangi peranan PKI
dalam sistim dengan demikian selama keduanya masih tetap
bersaing maka peranan Presiden sebagai pemegang kunci akan
tetap kokoh dan idenya akan tetap terlaksana.⁴³

⁴¹

Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik di Indo -
nesia, PT Gramedia, Jakarta, 1990, hal. 42.

⁴² Ibid, hal. 43.

⁴³ Chairul Anam, Op, Cit., hal. 223.

C. Tanggapan NU Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Sebagaimana yang telah penulis singgung pada Bab II diatas bahwa setelah bubarnya Kabinet ARI, Indonesia dalam keadaan darurat, peranan parlemen, partai-partai politik menjadi merosot hususnya NU, sebab kekuasaan sepenuhnya bukan berada ditangan Parlemen tapi di tangan Presiden, dengan demikian gerak langkah Presiden Soekarno semakin menjadi-jadi. Ia mengangkat dirinya sebagai badan formatur. Dan pada tanggal 9 April 1957 ia segera membentuk Kabinet baru dengan nama Kabinet Kerja.

NU sadar pembentukan Kabinet dengan cara main tunjuk seperti itu adalah menyalahi prinsip Demokrasi tapi apa boleh buat NU tidak mungkin dapat melawan kehendak Presiden Soekarno yang memang merupakan satu-satunya orang terkuat saat itu. Hanya saja NU menyadari bahwa peristiwa itu adalah benar-benar merupakan hal yang ihtiyari artinya suatu peristiwa diluar batas kemampuan Manusia dan tidak dapat dihindari. Sulit bagi NU mencari alternatif, kalau NU menerima putusan Presiden Soekarno berarti NU ikut andil dalam melestarikan sistim otoriter, jika menolak berarti memberi peluang bagi golongan kiri untuk berkuasa.

Sjalan dengan itu pada ahir tahun 1958 awal tahun 1959 Soekarno mempunyai gagasan lagi untuk mema-

sukkan golongan fungsional kedalam DPR. Persoalan golongan ini menjadi topik utama dalam konstalasi politik di Indonesia.⁴⁴ Lalu bagaimana tanggapan dan sikap NU terhadap Presiden Soekarno untuk memasukkan golongan fungsional kedalam DPR?

Kita lihat dulu kenyataan yang ada, bahwa Presiden Soekarno ketika itu adalah orang kuat yang menjadi ukuran politik di Indonesia. Pada dasarnya NU menerima gagasan tersebut dengan catatan harus berdasarkan (1) UUDS (2) Persetujuan DPR (3) Wewenang Presiden yang diberikan oleh UUDS dan (4) Kopartaian yang sehat yang menjadi saluran pertama dari Demokrasi yang sehat (Demokrasi Terpimpin).⁴⁵

Tetapi persoalan fungsional semakin menajam terpaksa NU berhadapan langsung dengan Presiden Soekarno sampai tiga kali di Bogor. NU harus merumuskan pendapatnya pada tanggal 28 januari 1959, yang pada pokonya NU menyetujui golongan dalam arti angkatan bersenjata, sedangkan seperti seniman, wartawan maupun Ilmuan dan lain-lain harus melalui pemilihan umum.⁴⁶ Sikap ini termaktup dalam surat keterangan PB NU mengenai Demokrasi Terpimpin tertanggal 20 Perbuari 1959, sebagaimana telah dikutip oleh Chairul Anam sebagai berikut:

⁴⁴Ibid, hal. 212.

⁴⁵Ibid, hal. 212.

⁴⁶Ibid, hal. 213.

(a) Masuknya golongan fungsional kedalam DPR melalui pemilihan umum; (b) Sesuai dengan pikiran-pikiran yang telah dimajukan NU sebelumnya, bahwa terhadap ABRI oleh panglima tertinggi dapat diangkat duduk dalam Parlemen masing-masing : 15 buat AD termasuk OKD dan OPR, 5 buat AU dan 7 buat ke-lisian, dengan syarat bahwa anggota AB tidak menggunakan hak pilihnya baik aktif maupun pasif dalam pemilihan umum; (c) Dalam daftar calon partai-partai untuk pemilihan umum disusun dengan sedemikian rupa, agar golongan fungsional tercakup didalamnya.⁴⁷

Begitu juga sikap NU terhadap Demokrasi Terpimpin dalam menghadapi sistim otoriter ini NU terkenal dengan sikap politik realistik dan pragmatis. Dalam hal ini Saifuddin Zuhri misalnya membawakan dalil pesantren dalam rangka NU turut sistim yang diciptakan oleh Presiden Soekarno itu: "Maalayudraku Kulluhu LaatuDraku Kulluhu" ; apa yang tidak dapat diraih seratus persen sebagai yang dapat diraih jangan dilepaskan. Berpegang pada prinsip diajarkan dipesantren ini, maka NU memutuskan untuk masuk dalam sistim Demokrasi Terpimpin. Sikap yang positif NU terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu dinyatakan sejak 11 Januari 1959 sewaktu Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan partai-partai yang pada waktu itu dari kalangan NU dihadiri oleh KH. Wahab Chasbullah , Idhom Chalid, Jamaluddin Malik dan Zainal Arifin, ketika ditanyakan tentang sikap NU terhadap Demokrasi Terpimpin Zainal Arifin menjawab: semua

semua orang tahu bahwa pendirian NU, yaitu setuju dengan Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Musyawarah.⁴⁸ Bahkan sikap ini sudah di sejak ahir tahun 1958 hanya saja prinsip NU titik beratnya pada "Demokrasi" itu sendiri, dan bukan pada pimpinannya. Demokrasi yang tidak Terpimpin akan menimbulkan Anarkisme, dan sebaliknya sesuatu yang dipimpin tanpa Demokrasi akan menimbulkan dektatorisme. Logika inilah yang melatar belakangi sikap NU menyetujui Demokrasi yang kemudian disampaikan pada 13 Agustus 1958:

(a) Pelaksanaannya tidak menuju kearah pembekuan - parlementarisme; (b) Pelaksanaannya tidak mengarah pada penghapusan party waze; (c) Pelaksanaannya menuju kepenyederhanaan dan penyehatan party waze melalui Undang-Undang kepartaian dan atau penyempurnakan Undang-Undang pemilu; (d) Pelaksanaannya tetap teguh memegang dasar pengertian kedaulatan tetap ditangan rakyat yang disalurkan melalui perlemen yang seharusnya menjadi pusat kegiatan politik; (e) Pelaksanaannya tetap memberi kedaulatan dan kebebasan kepada konstituante untuk menyelesaikan tugasnya.⁴⁹

Demikianlah sikap NU dalam menghadapi konstalasi politik Indonesia dalam dekade ahir Demokrasi Lebral beralih pada sistim Demokrasi Terpimpin yang diciptakan oleh Presiden Soekarno. Namun demikian uji coba NU belum dapat berakhir sampai disini. NU masih banyak bergumul

⁴⁸ Syafi'i Ma'arif, Islam Dan Politik Di Indonesia-Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1959) Op, Cit., hal.6

⁴⁹

Chairul Anam, Op, Cit., hal. 213.

dengan batu karangnya Soekarno, apalagi dinyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sebagaimana yang telah disinggung penulis diatas, bahwa dengan dinyatakannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka seluruh jaringan kekuasaan politik jatuh ketangan - Presiden Soekarno, akibatnya tindakannya semakin terlepas dari kontrol sehingga jatuh pada sistim politik otoriter maka dengan waktu yang singkat seluruh tata pemerintahan berganti dengan pola sistim yang baru. Dewan Nasional - yang telah dibentuk 11 Januari 1957 dibubarkan dan diganti dengan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). MPR hasil pemilihan umum rakyat dibubarkan dan diganti dengan MPRS yang diatur dalam penetapan Presiden (Penpres) No 12 tahun 1959, begitu juga DPR sebagai hasil pemilihan rakyat dibubarkan dan selanjutnya diganti dengan DPR-GR dan diatur melalui Penpres No. 4 tahun 1960, kemudian disusunlah Manipol USDEK sebagai pedoman jalannya Demokrasi Terpimpin. Dan sebagai titik ahir kolminasinya dia ingin menyatukan antara golongan Nasionalis, Agama dan Komunis, yang terkenal dengan selogan NASAKOM.⁵⁰

Dengan demikian maka berhasillah Presiden Soekarno memainkan kartunya diarena politik kenegaraan, sedang partai-partai politik yang lain (hususnya NU) yang

tinggal kelabakan mencari Ijtihad politiknya. Dalam menyesuaikan sikap Demokrasi Terpimpin dan DPR-GR ini NU pada mulanya mempunyai dua alternatif menolak atau menerima.

Ahirnya Dewan Partai NU mengadakan sidang Partai yang berlangsung dari 24-27 April 1960. Dalam sidang Dewan Partai tersebut, KH. Wahab Chasbullah sebagai Ro'is Am NU segera menentukan sikapnya sebagaimana yang telah dikutip oleh Syafi'i Ma'arif dalam "Syarifuddin Zuhri, KH. Wahab Chasbullah Bapak Pendiri NU":

"Kita putuskan sekarang ini insaja karna waktunya sudah sangat mendesak, menunggu berlangsungnya musyawarah bisa ketinggalan kereta Api. Kita putuskan sekarang saja, kita masuk saja dulu dalam DPR-GR, setelah itu kita penegasan musyawarah antar Wilayah. Kalau musyawarah antar Wilayah memutuskan kita harus masuk, kita sudah berada didalam. Tetapi jika musyawarah memutuskan menolak DPR-GR, apa sulitnya kita keluar dari DPR-GR akan tetapi kalau sekarang ini kita menolak duduk dalam DPR-GR.....lalu musyawarah Wilayah memutuskan kita harus masuk kedalam DPR-GR, kita sudah terlambat, pintu masuk sudah tertutup."

KH. Wahab Chasbullah tampaknya cukup kritis dalam menghadapi situasi pada saat itu. Dia pandai memanfaatkan momen psikologis masa, sehingga sewaktu diadakan musyawarah wilayah tentang masuknya tidaknya NU kedalam DPR-GR, strategi KH Wahab ini mendapat dukungan yang sangat besar, maka benarlah apa yang dikatakan oleh KH.-

Wahab Chasbullah yang penting masuk lebih dulu, perkara musyawarah menolak, keluar dari DPR-GR itu masalah yang sangat gampang. Dan tampaknya Kiai Wahab sudah memperhitungkan segalanya, yakni bila diputuskan masuk maka partai ini sudah akan tetap didalamnya. perkiraan ini sepenuhnya dibenarkan oleh Sejarah.⁵²

Demikian maka NU cukup berperan dalam DPR-GR dan dapat bergumul dengan move-move politik Soekarno sampai sistim ini berakhir di tahun 1965.

Demikianlah diantara logika NU menangkap realitas-politik Presiden Soekarno yang sangat keras di era Demokrasi Terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1965.

⁵²

Ibid, hal.92.